

---

---

**ANALISIS *OPEN GOVERNMENT* PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, REPUBLIK INDONESIA**

**Anggraeni Respitawulan**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia

*anggra\_respita@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*The change paradigm in energy demand side and supply side management make government should think creatively to increase nergy national mix 23% at 2025 with new and renewable energy development programme. This research aims to describe the open government strategy condition in new and renewable energy development programme use kualitatif method through interview and observation. In general, implementation of open government have on the directorate general ebtke has been implemented in terms of planning, implementation and supervision activities. This reseach find that new and renewable energy programme basically has a good platform, proven from a lot of using information and technology to support the programme. But unfortunately, many platform are not used optimally to increase tranparency, participation and collaboration as a open government theory to the new and renenwable energy programme. In the transparency aspect informatio technology has used to broadcast information, in participation aspect, public has no access to policy formulation. While in the collaboration aspect show with many cooperation between government, private sector, public, NGO and other institution or country in various new and renewable energy programme.*

**Keywords:** *Transparency, Participation, and Collaboration.*

**ABSTRAK**

Perubahan paradigma pengelolaan energi dalam sisi *demand side management* dan *suplly side management* pemerintah perlu berfikit kreatif untuk meningkatkan target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 melalui program pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk memotret pelaksanaan *open government* dalam program pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT) menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pegembangan EBT pada dasarnya telah memiliki *platform* yang cukup baik, terbukti dengan banyaknya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang program dimaksud. Pada umumnya pelaksaan open government pada Ditjen EBTKE telah diimplementasikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Namun sayangnya *platform* teknologi informasi yang telah tersedia belum digunakan secara optimal dalam menunjang transparansi, partisipasi dan kolaborasi sesuai teori *open government* dalam program pengembangan EBT. Dalam aspek transparansi telah digunakan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi, dalam aspek partisipasi, masyarakat belum mempunyai akses langsung dalam perumusan kebijakan. Sedangkan aspek Kolaborasi ditunjukkan dengan kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, masyarakat, NGO dan lembaga /negara donor dalam berbagai program pengembangan EBT.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi*

## PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi informasi dalam pemerintahan membawa konsekuensi pada merebaknya pemanfaatan internet sebagai alat dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi telah merubah warna proses administrasi pemerintahan yang selama ini mendapat stigma berbelit-belit, boros dan lama berkembang menjadi administrasi pemerintahan yang efisien dan cepat. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mendukung pemanfaatan elektronik *government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam laporan *Open Government Indonesia* disebutkan bahwa tingkat penggunaan internet di Indonesia sebesar 17,14% dari total populasi penduduk mengakses internet (OECD, 2016). Akses ini termasuk akses terhadap portal data pada website instansi pemerintah. Tingginya akses internet ini membawa implikasi pada tuntutan modernisasi sistem pemerintahan dari yang *paper based* menjadi *internet based* sehingga muncul istilah *e-government*.

Penerapan teknologi informasi ini berangsur-angsur mulai berevolusi

dalam melalui kebijakan *open government*. OECD mendefinisikan *open government* sebagai transparansi tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah serta ketanggaan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan. *Open government* sendiri berpijak pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dengan menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, partisipasi dan kolaborasi pemerintah. (*open government Indonesia*, 2016). Dalam laporan *The World Justice Project Government Index* pada tahun 2015 Indonesia mendapat peringkat 32 dari 102 negara yang disurvei dengan skor 0,58. Survei ini melihat dimensi

**Tabel 1. Peringkat Open Government di Asia Pasifik**

No	Country	Score	Global Ranking
1	New Zealand	0,81	2
2	Australia	0,74	9
3	Republik Korea	0,74	10
4	Japan	0,72	12
5	Hongkong	0,63	24
6	Singapura	0,63	25
7	Indonesia	0,58	32
8	Filipina	0,54	50
9	Thailand	0,49	68
10	Mongolia	0,56	75

Sumber : *The World Justice Project Government Index 2015 Report*

publikasi data dan peraturan perundang-undangan, kebebasan informasi,

partisipasi warga dan penanganan pengaduan.

Tuntutan penyediaan energi yang meningkat 6-7% pertahun membuat pemerintah perlu mencari alternatif pengembangan energi dengan mengembangkan energi baru terbarukan yang saat ini porsinya dalam *energy mix* baru sebesar 12,52% dari target 23% pada tahun 2025 (ESDM, 2018). Padahal Indonesia mempunyai potensi energi terbarukan yang melimpah, bahkan potensi panas bumi di Indonesia menjadi yang terbesar didunia. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai energi baru menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan energi baru. Selain itu penggunaan energi baru sebagai alternatif pengganti batubara dalam penyediaan listrik masih awam bagi masyarakat, ditambah lagi harga pembangkit dari sumber energi baru yang lebih mahal membuat banyak pihak menjadi enggan untuk melakukan investasi. Padahal energi baru merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan efeknegatif bagi gas rumah kaca dan polusi.

Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan upaya yang komprehensif guna menggalakkan penggunaan energi baru sehingga porsi energi baru dalam bauran energi nasional dapat meningkat. Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (KEDM) selaku pemegang tanggung-jawab dalam perumusan kebijakan bidang energi mempunyai andil yang besar untuk membuat energi baru dapat diterima oleh masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang menarik sehingga pembangunan energi baru dapat ditingkatkan. Melihat gambaran tersebut, pentingnya membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan swasta/ *stake holder* menggunakan sarana teknologi informasi dalam kerangka *open goverment* yang tujuannya untuk meningkatkan penggunaan energi baru untuk memenuhi kebutuhan energi dirasa penting. Untuk itu penelitian ini mengambil judul analisis open goverment dalam pengembanagn energi baru dan energi terbarukan.

*Open goverment* sendiri dipopulerkan oleh Obama dalam *Open Goverment progress to the American People* yang kemudian banyak diadopsi oleh berbagai negara karena dianggap

sesuai dengan kondisi saat ini. *Open government* berfokus pada interaksi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat terutama dengan penggunaan media teknologi informasi. *Open government* dapat didefinisikan sebagai kode dari pemerintahan yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kerjasama melalui penggunaan teknologi informasi secara intensif dan sistem manajemen baru yang berlandaskan tata kelola bersama dan tanggungjawab bersama dengan masyarakat dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai publik dengan mempromosikan inovasi dan perkembangan. (Criado dalam Siera dan Gago, 2018). Febrianingsih (2012 dalam Prakarsa (2017) menyatakan bahwa *open government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan parsitipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

*Open government* mempunyai prinsip kebijakan menurut OECD (2016) meliputi:

- Adanya keterlibatan publik dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi;

- Terdapat transparansi dalam penyenggaraan kebijakan;
- Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- Integritas yang tinggi dari pelaksana kebijakan.

**Tabel 2 Variabel dan Dimensi *Open Government***

No	Variables	Dimensions	Examples
1	Transparency	Information and open data	Open data portals
		Training Programs	Digital inclusion policies
		Public Policies monitoring	Follow the money, access to information
2	Participation	Consultation	On line consultation
		Deliberative arenas	Public debates, on line forums
		Co-Decision of public policies	Co drafting, consensus-oriented procedures
3	Collaboration	Horizontality	Multi stakeholderism
		Transversality	Multi level governance
		Collaborative Governance	Public-private-civic partnership, shared decision making

Sumber : *Blasio and Sorice, 2016 (Open Government : A Tool for democracy*

Komitmen Indonesia dalam *open government* tertuang dalam RPJMN 2015-2019 melalui strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan komunikasi serta mendorong kemudahan akses terhadap informasi. OECD (2011) sebagaimana dikutip Cretu (2014) menyatakan bahwa “*open government is seen as a platform for improving government capacity and public administration reform*”. Penelitian ini menggunakan variabel

*open government* yang dikemukakan oleh Blasio dan Sorice (2016) dimana *open government* terdiri dari tiga variabel yaitu transparansi, partisipasi dan kolaborasi yang tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Senada dengan Blasio and Sorice (2016), Wirtz and Birkmeyer (2015) menggambarkan *open government* sebagai bentuk hubungan antara transparansi, partisipasi dan kolaborasi dalam organisasi pemerintah kepada masyarakat, organisasi dan kelompok sosial untuk meningkatkan nilai masyarakat. Hubungan ini dipengaruhi secara simultan dengan adanya faktor pendukung yaitu teknologi, peraturan, akuntabilitas dan penerimaan dari masyarakat

## **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Selain itu untuk mendukung penelitian dilakukan pengumpulan data dukung melalui penelusuran berbagai dokumen seperti buku, jurnal nasional dan internasional, prosiding nasional dan internasional, artikel, laporan, dan rencana kerja. Studi

ini merupakan analisis deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan *open government* dalam program pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi pada Ditjen EBTKE. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2018

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterbukaan data dan informasi dalam program pengembangan energi baru data diwujudkan dengan adanya portal Direktorat Jenderal EBTKE dan portal lintas EBTKE yang merupakan wujud dari publikasi mengenai informasi kegiatan dan data energi baru terbarukan. Disusunnya rencana strategis pengembangan energi baru yang tertuang dalam road map pengembangan energi baru, yang dapat diunduh melalui portal tersebut menjadi sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan. Data dan informasi yang dipublish pada website ini merupakan data yang tidak bersifat rahasia dan dapat di sebarluaskan kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Dalam kaitannya dengan kebijakan digital program pengembangan energi baru mempubyai berbagai aplikasi *online* yaitu : Aplikasi SKT Jasa Konservasi Energi, Aplikasi Sistem informasi

produk hemat energi, Aplikasi Pendaftaran Penghargaan Efisiensi Energi Nasional, Sistem Informasi Pelaporan Penghematan Energi dan Air, Aplikasi Pelaporan Online Manajemen Energi, Aplikasi Database Biomassa , Sistem informasi layanan bahan bakar nabati, Sistem Informasi Pelaporan Panas Bumi dan, Database Panas Bumi Berbasis Web dan GIS, Aplikasi Akuisisi Data PLTS, Sistem Informasi Kerjasama Aneka EBT, Sistem Informasi Pelelangan Kuota PLTS, Sistem, Informasi Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka EBT dan Database dan Aplikasi Permohonan Infrastruktur EBT. Berbagai platform online tersebut berguna untuk menjuang peningkatan pemanfaatan energi baru dalam bauran energi nasional. Namun sayangnya dari berbagai portal tersebut updating data menjadi kendala utama sehingga seringkali data yang dipublish tidak *real time*. Kelaamatan ini menjadi jamak bagi organisasi pemerintah dimana tingkat updating data dan informasi pada website rendah sehingga data yang disediakan tidak *up to date*.

Wirtz and Birkmeyer (2015) mengatakan bahwa transparansi adalah gambaran dari demokrasi yang ideal dan website pemerintah adalah salah

salah satu alat untuk meningkatkan transparansi. Teknologi informasi penting dikembangkan dalam organisasi publik untuk mendukung pengembangan website pemerintah demi meningkatkan transparansinya. Hal ini juga dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Obama yang meningkatkan transparansi melalui intensifitas penggunaan teknologi.

Meskipun telah ada portal mengenai layanan informasi dan investasi, namun sayangnya belum terdapat Standar Pelayanan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan untuk mempublish persyaratan, biaya, jangka waktu dan tata cara pengajuan keluhan secara resmi melalui peraturan. Meskipun demikian layanan pengaduan dapat disampaikan melalui website ataupun email secara langsung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2006) diatas bahwa indikator dalam transparansi menjadi tolok ukur tingkat keterbukaan organisasi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam hal *Public Policies Monitoring* masyarakat belum terdapat sistem/aplikasi yang digunakan untuk memonitor capaian kinerja secara *real*

time hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap program-program yang dijalankan. Keterbukaan kebijakan yang ada terwujud dari laporan kinerja yang dibuat setiap tri semester dipublish pada website. Bremer (2013) menyebutkan bahwa *e-rulemaking* merupakan dorongan untuk meningkatkan transparansi dalam pembuatan kebijakan. Namun konsep ini belum dapat diaplikasikan karena pada Ditjen EBTKE karena belum adanya regulasi yang melegalkan penggunaan media elektronik dalam pembuatan aturan/kebijakan.

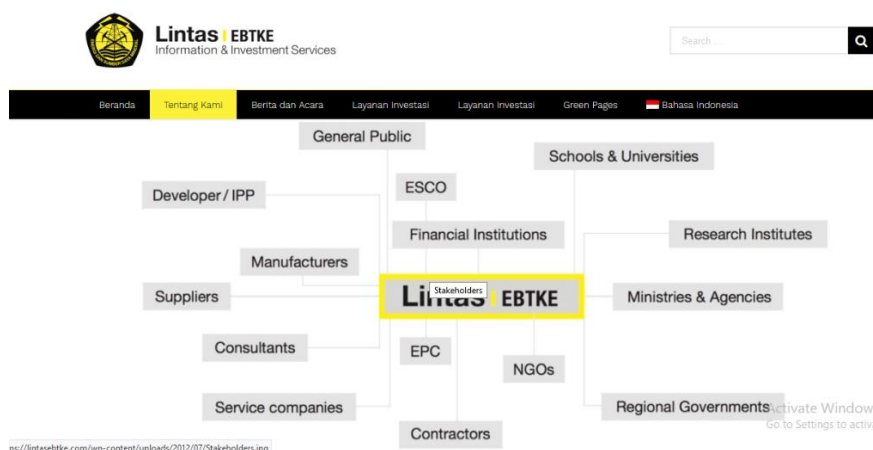
#### *Partisipasi dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan*

Harrison et al (2012) mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui diskusi dan

deliberasi. Adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui akuntabilitas yang dibangun. Meskipun partisipasi masyarakat sendiri masih menjadi perdebatan mengenai keuntungan dan kerugiannya namun adanya peluang bagi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat meningkatkan pengetahuan, ide dan pengalaman sehingga meningkatkan efektivitas dan kualitas dari suatu kebijakan.

Dengan adanya teknologi informasi partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan menjadi lebih mudah dilakukan mengingat keberadaan internet sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan menjangkau ide dan menuangkan aspirasi. Ditjen EBTKE meresmikan LINTAS EBTKE pada 25 april 2016. Keberadaan LINTAS EBTKE ini diharapkan sebagai poros

**Gambar 2. Portal LINTAS EBTKE**



informasi, sarana konsultasi dan online forum yang dapat mendekatkan pemerintah dengan stakeholder dan masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat menunjang partisipasi masyarakat adalah inovasi pengajuan usulan program pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan secara *online* dimana pemerintah daerah dapat mengirimkan proposal pembangunan melalui aplikasi tersebut dan dapat melakukan komunikasi dua arah dengan pihak Ditjen EBTKE.

LINTAS EBTKE ini mencakup berita dan informasi mengenai energi baru, terbarukan dan konservasi energi, layanan informasi baik prosedur dan potensi energi dan layanan investasi yang meliputi investasi energi terbarukan (hidro, panas bumi tenaga surya, bioenergi, angin dan lautan), konservasi energi (industri, gedung dan bangunan, transportasi dan rumah) serta sumber daya. Namun menurut pengakuan Kepala LINTAS EBTKE, selama ini LINTAS belum dimanfaatkan secara optimal beberapa pelayanan masih dilakukan oleh masing-masing unit terkait. Keberadaan LINTAS lebih banyak sebagai sarana edukasi pengenalan energi baru dan konservasi energi melalui penerimaan

kunjungan dari sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana konsultasi online belum banyak terekspos, hal ini lantaran peraturan yang ada belum banyak mengakomodir sarana online sebagai dasar yang sah dalam pembuatan keputusan. Dalam hal penyusunan peraturan pelibatan masyarakat yang diwakili oleh DPR dan Pemerintah daerah lebih banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka lantaran persetujuan pembuatan peraturan membutuhkan paraf koordinasi dari berbagai pihak terkait yang secara yuridis tidak bisa terwakili dengan keberadaan teknologi informasi. Belum adanya aplikasi penyusunan perundang-undangan *online* membuat perumusan peraturan masih mengandakan prosedur tradisional melalui tatap muka dan diskusi langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung belum dapat diwujudkan dalam perumusan kebijakan, namun partisipasi tersebut diwakilkan melalui anggota dewan yang diharapkan dapat membawa aspirasi masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ditjen EBTJE meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Energi Desa (Sinergi Desa)



yang bertujuan untuk menjaga kualitas layanan listrik dari pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan. Aplikasi ini mengakomodir proses perencanaan pembangunan dan pemeliharaan dima adidalamnya terdapat tiga aplikasi lain yang saling menunjang yaitu e-proposal (proposal elektronik), Sistem Akuisisi Data serta Sistem Infomrasi dan Komunikasi dua arah melalui aplikasi ponsel “Energi Desa”. Dalam aplikasi e-proposal masyarakat dapat mengusulkan desanya untuk mendapat pembangunan infrastruktur PLT EBT baik yang menggunakan sumber tenaga matahari dan air menggunakan anggaran APBN maupun DAK, aplikasi akuisisi data digunakan untuk monitoring pembangkit yang sudah dibangun, sedangkan ENERGI DESA merupakan forum tanya jawab tentang pengoperasian PLT EBT. Masyarakat pengusul juga dapat mengetahui jumlah usulan yang telah masuk, status usulan, jumlah anggaran dari usulan yang diajukan, total kapasitas energi yang diusulkan, rencana strategis serta peta sebaran titik lokasi usulan. Pihak pemerintah pusat dyakni Ditjen EBTE dapat melakukan verifikasi data usulan yang masuk dengan memberikan hasil

review melalui aplikasi dimaksud sehingga masyarakat pengusul dapat langsung melihat status pengusulannya. Adanya palikasi ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk ikut serta memberikan usulan dalam pembangunan EBT. Sampai saat ini tercatat telah ada sekitar 500 desa yang mengajukan pembangunan EBT menggunakan aplikasi ini. Adanya aplikasi ini juga memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dimulai dari proses perencanaan, monitoring bahkan operasional penggunaan EBT Sebelumnya pengajuan dilakukan secara manual dimana pihak masyarakat / pemerintah daerah mendatangi kantor Ditjen EBTKE untuk menyampaikan usulan pembangunan dengan membawa berkas pendukung. Melalui inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu.

Untuk sumber energi panas bumi digunakan aplikasi Indonesia *geothermal information and service*, yang dapat diakses melalui portal LINTAS EBTKE. Dalam aplikasi tersebut masyarakat selain dapat mengetahui wilayah kerja panas bumi

yang ditawarkan serta progres pembangunan pembangkit panas bumi dapat mengetahui peta potensi serta kapasitas pembangkit yang telah ada.

Jika dikategorikan dalam jenjang partisipasi masyarakat menurut Arnstein diatas partisipasi dalam pengembangan energi baru terbarukan termasuk pada kategori *consultating* yaitu masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh DPR) diundang untuk menyampaikan pendapat namun pendapat meskipun pendapat tersebut masih akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Blasio dan Sorice (2016) dimana salah satu indikator dari adanya *participation* dalam *open goverment* adalah adanya *consultation*. Namun sayangnya *consultation* yang dimaksudkan Blasio dan Sorice disini berbeda dengan kenyataan dilapangan bahwa konsultasi seharusnya dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi secara *online*. Pada prakteknya konsultasi dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Sampai saat ini belum ada legalitas mengenai *online consultation* yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam pengambilan suatu kebijakan. Padahal jika ditelisik

lebih jauh organisasi pemerintah telah mempunyai fasilitas yang memadai untuk melakukan *online consultation*.

Sejalan dengan *online consultation*, dalam hal *public debates* melalui *online* forum belum terjalin forum komunikasi secara online yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. *Online* forum yang ada dalam bentuk *whatsapp group* lebih sering digunakan sebagai ajang diskusi informal. Padahal *public debates* ini seharusnya dapat digunakan sebagai sarana menjaring ide dari masyarakat. Belum adanya legalitas penggunaan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan menjadi hambatan krusial penerapan *open goverment* dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Hal ini juga menjadi hambatan dalam *co-decision of public policies* dimana pembuata kebijakan merupakan wewenang dari lembaga eksekutif sendiri terlebih bagi kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

#### *Kolaborasi dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan*

Kolaborasi dalam pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi terlihat dari banyaknya

kerjasama dengan stakeholder dan *non government organization* melalui hibah dan pendanaan dalam pengembangan energi baru. Kolaborasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan adalah pembangunan portal LINTAS EBTKE yang mana merupakan kerjasama Ditjen EBTKE dengan DANIDA (*Danish International Development Assistance*) dimana DANIDA memberikan bantuan dana dan alih teknologi dalam pembangunan LINTAS EBTKE. Selain itu diluncurkannya *Web Geothermal Information System* yang pernah menjadi juara harapan satu dalam inovasi pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas dan akurat secara cepat dan mudah. Melalui inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi guna pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Mahalnya biaya penyediaan energi baru dan energi terbarukan membuat pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dalam hal akuisisi data Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang menggunakan teknologi *remote sensing*

dimana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan perkembangan termasuk kerusakan pembangkit tenaga surya yang ada pada daerahnya dan langsung terhubung dengan pengelola atau teknisi untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan. Bagi pemerintah teknologi ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap pembangunan pembangkit karena masyarakat akan melaporkan secara langsung penggunaannya. Adanya aplikasi *remote sensing* ini menjadikan pelayanan monitoring dan evaluasi PLTS menjadi lebih efisien dan cepat karena tidak diperlukan kehadiran fisik di lokasi yang notabene susah dijangkau dan menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk mencapainya.

#### *Faktor yang mempengaruhi open government*

Penerapan *open goverment* sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan perlu mendapat dukungan dari faktor teknologi, peraturan dan hukum, akuntabilitas serta penerimaan dan kepercayaan (Wirtz and Birkmeyer (2015). Pemerintah perlu berinvestasi dalam pemanfaatan teknologi dan jaringan untuk mendukung pelaksanaan *open goverment*. Penggunaan teknologi

informasi dalam membangun website dan sosial media untuk mempromosikan keterbukaan, partisipasi dan kolaborasi merupakan persyaratan mutlak bagi organisasi publik yang bergerak ke arah *open government*. Anggaran pada pemanfaatan teknologi informasi pada Ditjen EBTKE lebih kepada anggaran *maintenance* teknologi informasi yang telah ada, namun anggaran untuk *upgrade* dan memperluas kapasitas dari teknologi informasi belum terwujud. Hal ini terkait dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi merupakan kegiatan yang dianggap sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok, bukan fungsi utama dari unit tersebut sehingga alokasi anggaran untuk teknologi informasi terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan sistem yang sudah ada.

Pemanfaatan teknologi tersebut perlu didukung dengan adanya peraturan dan legalitas karena dasar pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah adalah regulasi dan peraturan. Perbedaan peraturan diantara organisasi publik menjadikan *open government* dimaknai berbeda pada setiap level pemerintahan. Dalam pelaksanaan *open government* pada Ditjen EBTKE belum terdapat peraturan yang

mendukung penggunaan *open government* secara rinci dalam pengambilan keputusan. Namun pelaksanaan *open government* disini sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan *e-government* pada organisasi publik. Belum adanya aturan tersebut membuat pengambilan keputusan tidak bisa dilaksanakan menggunakan *e-rulemaking* proses, namun *open government* digunakan sebagai bentuk dari pemberian informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemudahan pelayanan publik melalui pemanfaatan *e-government*.

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan merupakan faktor pendorong dari transparansi pemerintahan. Akuntabilitas organisasi publik di Indonesia seringkali dimaknai sebatas laporan kinerja. Adanya publikasi laporan kinerja pada website Ditjen EBTKE dianggap merupakan gambaran dari akuntabilitas pemerintah, selain itu perwujudan akuntabilitas dalam SAKIP dimaknai sebagai proses pertanggungjawaban organisasi publik kepada masyarakat. Meskipun pada hakekatnya akuntabilitas bermakna

lebih luas namun kedua hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa akuntabilitas telah dilaksanakan dalam batas minoritas.

Faktor terakhir yang menentukan sukses tidaknya *open government* adalah penerimaan dari masyarakat. Dilihat dari jejak kunjungan pada website Ditjen EBTKE rata – rata jumlah kunjungan perhari sekitar 442 orang dan jumlah kunjungan setiap bulan sekitar 13.260 orang. Meskipun demikian hal tersebut belum dapat dijadikan indikator penerimaan masyarakat terhadap *open government* yang dilakukan.

Perlunya dukungan dari sisi legalitas penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu alat sah dalam pengambilan kebijakan akan membantu mempercepat proses pembuatan kebijakan. Upaya memaksimalkan teknologi informasi yang telah tersedia guna mendukung terciptanya transparansi, partisipasi dan kolaborasi mengoptimalkan program pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi juga membutuhkan komitmen pimpinan serta kemauan berbagai pihak yang terlibat sehingga platform-platform yang telah tersedia dapat mendukung pelaksanaan *open government*.

## SIMPULAN

Pelaksanaan *open government* dalam program pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi telah dimulai semenjak berdirinya Direktorat Jenderal EBTKE, banyaknya *platform* berbasis teknologi informasi yang telah dibangun menandakan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan *elektronik government* yang berkembang menjadi *open government* dengan menitik beratkan pada transparansi, partisipasi dan kolaborasi. Adanya portal LINTAS EBTKE menjadi salah satu contoh mulai dibangunnya keterlibatan pihak lain dalam perumusan kebijakan. Namun sayangnya berbagai *platform* tersebut belum dapat digunakan secara optimal dikarenakan belum adanya dukungan regulasi yang dapat menjadi landasan yuridis penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan. Penggunaan teknologi informasi sebatas pada alat monitoring dan bahan evaluasi serta sarana komunikasi dengan masyarakat yang kemungkinan digunakan sebagai salah satu masukan pembuatan kebijakan.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan instansi untuk meningkatkan pelaksanaan *open*

*government* dalam pengembangan energi baru terbarukan. Pertama, membangun komitmen pejabat terhadap pembuatan kebijakan secara terbuka dengan pemanfaatan teknologi informasi baik melalui pemanfaatan media sosial maupun melalui *electronic regulation*. Kedua, menyusun regulasi terkait pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan administratif dan pembuatan kebijakan misalnya dalam hal keabsahan penggunaan *e-signature* dan *video conference* dalam perumusan kebijakan. Ketiga, mendorong kelompok kepentingan yaitu masyarakat dan *stake holder* untuk berperan aktif dalam pemanfaatan website, electronic government maupun media sosial Ditjen EBTKE untuk melakukan aktivitas pelayanan publik maupun akses informasi. Keempat, memperkuat sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana *open government* dan sumberdaya financial untuk pengembangan teknologi informasi.

Keterbukaan pemerintah diharapkan dapat membantu mensukseskan tercapainya tujuan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu bauran energi baru dan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Keterbukaan informasi

yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan ide-ide kreatif yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan membawa pengaruh pada akuntabilitas pemerintah yang mendorong pemerintah untuk berkinerja lebih baik. Adanya peran serta masyarakat melalui keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan akan membawa berpengaruh pada meningkatnya transparansi, partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan *stakeholder* secara sinergis untuk bersama-sama menciptakan tujuan pengembangan energi baru dan energi terbarukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrozaaq, Dimas Lukito. Collaborative Governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo) <http://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- Blasio, De Emiliana and Sorice, Michele. 2016 .Open Government : A Tool for democracy? ([https://www.researchgate.net/publication/311850643\\_Open\\_Government\\_A\\_Tool\\_for\\_Democracy](https://www.researchgate.net/publication/311850643_Open_Government_A_Tool_for_Democracy))
- Cretu, Veronica and Cretu Nicolae, 2014, How To built local open

- government?European Public  
sector information platform topic  
report no 2014/7  
([https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/2014\\_how\\_to\\_build\\_local\\_open\\_government.pdf](https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/2014_how_to_build_local_open_government.pdf))
- Djunaedi, Achmad.2002.Beberapa  
Pemikiran Penerapan e-government  
dalam pemerintahan daerah di  
Indonesia.  
(<http://otda.lampungprov.go.id/download.php?file=files/e-govt-pemda-indo.pdf>)
- Direktorat Jenderal Energi Baru,  
Terbarukan dan Konservasi  
Energi. 2015. Road Map  
Pengembangan EBTKE 2014-  
2019. Jakarta :Ditjen EBTKE
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan  
Good Governance Melalui  
Pelayanan Publik*. Yogyakarta:  
UGM Press
- Fendt, Thomas Christian.2010.  
Introducing Electronic Supply  
Chain Collaboration in China :  
Evidence from manufacturing  
Industries. Berlin :  
Universitätsverlag Der  
Technischen Universität Berlin
- Harrison, T. M, Guerrero, S., Burke, B.  
G, & Cook, M. (2012). Open  
government and e-government:  
Democratic challenges from a  
public value perspective.  
*Information Polity*, 17, 83–97.
- Hernandez and Gasco Mila. 2014. *Open  
Government : an Opportunities and  
Challenges for Public  
Governance*. New York : Springer
- Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral. 2015. Rencana Strategis  
Kementerian ESDM 2015-2019.  
Jakarta : Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral
- Kementerian Komunikasi dan  
Informatika.2003. *Kebijakan dan  
Strategi Pengembangan e-  
government*.
- Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009).  
An institutional analysis of an e-  
government system for anti-  
corruption: The Case of Open.  
*Government Information  
Quarterly*, 26(1), 42-50.  
doi:10.1016/j.giq.2008.09.002
- Kuhn, Johannes. 2014. *Open government :  
Who Participates and why*. Berlin  
:Universiteit Twente
- OECD Kajian Open Government  
Indonesia Hal-Hal Pokok.2016
- OECD.2016.OECD Comparative Study  
: Digital Government Strategies  
For Transforming Public  
Services in the Welfare Areas.
- Sirera, Tatiana Fernandez and Gago,  
Elvira Gonzalez, 2018. *The  
Public Administration and The  
Open Innovation and Science  
Paradigm : Challenges and  
Opportunities*. Barcelona :  
Ministry of the Vice Presidency  
and of the economy and  
Finance.
- The World Justice Project Government  
Index 2015 Report*  
(<https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index-2015>)
- Prakarsa. 2017. Open Government :  
Mengkaji penggunaan e-  
government Pemerintah Daerah di  
Indonesia (Sebuah Laporan untuk

advokasi kebijakan implementasi e-government).

Wijaksono, Sigit. 2013. Pengaruh Lama Tinggal Terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman. *Jurnal ComTech Vol. 4 No 1 Juni 2013*

Wirtz, Bernd W and Birkmeyer Steven. 2015. Open Government : Origin, Development and Conceptual perspective. *International Journal of Public Administration*